

# Wacana Penolakan Pemimpin Perempuan di Yogyakarta (Analisis Wacana Kritis Teks Berita Harian Kompas)

## *Discourse on Rejection of Women Leader in Yogyakarta (Critical Discourse Analysis of Kompas Daily News Text)*

Catur Nugroho<sup>1)</sup>, Wisma Nugraha Christianto Richardus<sup>2)</sup>, Sugeng Bayu Wahyono<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi S3 Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
<sup>1,2,3</sup> Bulaksumur Yogyakarta 55281

mas\_pires@yahoo.com<sup>1)</sup>, krisnugraha@ugm.ac.id<sup>2)</sup>, bayu\_wahyono@yahoo.com<sup>3)</sup>

Diterima : 3 Februari 2021 || Revisi : 25 Maret 2021 || Disetujui: 30 April 2021

**Abstrak** – Fenomena kekuasaan di Yogyakarta menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk media nasional ketika muncul perbedaan pendapat mengenai syarat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Yogyakarta dijabat secara langsung oleh Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Permasalahan muncul ketika Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki, dan sebagian pihak mengartikan Undang-Undang dan Perda Keistimewaan mengharuskan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Masalah ini menarik media nasional untuk memproduksi teks berita terkait pro kontra pemimpin perempuan di Yogyakarta. Penelitian ini ingin membongkar bagaimana media nasional Harian Kompas mengkonstruksi wacana penolakan pemimpin perempuan dan bagaimana pertarungan memperebutkan penerimaan publik atau gagasan-gagasan ideologis terkait suksesi kepemimpinan di Yogyakarta. Dengan pendekatan kualitatif, metode dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Teks berita terkait pemimpin perempuan dianalisis mulai dari level teks, level wacana dan level sosiokultural. Hasil penelitian menemukan bahwa produksi teks berita Harian Kompas pada praktiknya merepresentasikan kelompok yang menolak pemimpin perempuan di Yogyakarta. Elite politik lokal di parlemen, bangsawan Keraton, dan Sultan HB X saling mempertahankan pendapatnya tentang hak perempuan untuk dapat menjadi pemimpin di Yogyakarta. Harian Kompas memberikan ruang pertarungan wacana isu penolakan perempuan tersebut untuk merepresentasikan keberpihakan mereka pada pihak yang menolak pemimpin perempuan.

**Kata Kunci:** pemimpin perempuan, Yogyakarta, Harian Kompas, analisis wacana kritis, teks berita

**Abstract** The phenomenon of power in Yogyakarta attracted the attention of various groups, including the national media when differences of opinion emerged regarding the requirements for candidates for Governor and Deputy Governor candidates of the Special Region of Yogyakarta. The Governor of Yogyakarta is directly held by the Sultan as the King of the Yogyakarta Palace in accordance with the Yogyakarta Privileges Law. The problem arose when Sultan HB X did not have a son, and some parties interpreted the special law and regional regulations requiring that the governor of Yogyakarta be held male. This problem has attracted the national media to produce news texts related to the pros and cons of women leaders in Yogyakarta. This research intends to uncover how the national media of Kompas daily constructs discourses on the rejection of female leaders and how the struggle for public acceptance or ideological ideas related to leadership succession in Yogyakarta. With a qualitative approach, the method used in this study is Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis model. News texts related to the issue of leadership succession were analyzed starting from the text level, discourse level and sociocultural level. The results of the study found that the production of the Kompas daily news text in practice represents a group that rejects female leaders in Yogyakarta. Local political elites in parliament, Keraton aristocrats, and Sultan HB X mutually defend their views on women's rights to become leaders in Yogyakarta. Kompas Daily provides a space for discourse on the issue of women's rejection to represent their side of those who reject women leaders.

**Keywords:** women leaders, Yogyakarta, Kompas Daily, critical discourse analysis, news text

### PENDAHULUAN

Yogyakarta adalah provinsi dengan status istimewa di Indonesia yang tidak mengenal pemilihan kepala daerah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, bahwa yang mengisi jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengku Buwono, sedangkan untuk jabatan Wakil Gubernur diisi oleh Adipati Paku Alam. Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Keistimewaan bertugas untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur pada setiap berakhirnya periode jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Keberadaan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengatur sistem pemerintahan di Yogyakarta, terutama dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan cara penetapan langsung. Dalam konteks semacam ini, konsep kedaulatan rakyat berdasarkan demokrasi permusyawaratan menemukan bentuknya (Laksono et al., 2011). Yogyakarta memiliki nilai historis dengan dimensi sosiokultural dan politis khususnya yang menyangkut proses demokratisasi dan sistem monarki yang dapat berjalan bersamaan tanpa menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan sosial, politik maupun pemerintahan (Asichin & Rochwulaningsih, 2018).

Perdebatan ihwal syarat calon gubernur DIY muncul ketika DPRD DIY membahas Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal 3 Ayat (1) huruf m aturan itu menyatakan, calon gubernur dan calon wagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Bunyi pasal tersebut sama persis dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Sebagian kalangan, termasuk para anggota dewan di DPRD DIY menafsirkan, pasal itu mengharuskan gubernur dan wagub DIY dijabat laki-laki. Perdebatan terkait perbedaan pandangan politik anggota DPRD DIY pernah diteliti oleh Kariem dkk yang melakukan penelitian dengan judul "Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Sukses Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta". Menurut hasil penelitian Kariem dkk, pandangan politik anggota DPRD DIY terbagi menjadi tiga, yaitu pertama pandangan yang mendukung wacana sukses, kedua adalah pandangan yang menolak wacana sukses, dan pandangan ketiga tidak menanggapi wacana sukses (Kariem et al., 2019).

Dari hasil penelitian Kariem dkk (2019) didapatkan kesimpulan bahwa tujuh fraksi yang ada di DPRD DIY memiliki penafsiran masing-masing terhadap UU Keistimewaan dan Perdais. Permasalahan ini yang

akhirnya menimbulkan persoalan, ketika pengisian jabatan Gubernur dan Wagub DIY akhirnya menjadi perdebatan panjang dalam proses politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perbincangan mengenai suksesi kraton semakin banyak mendapatkan perhatian media ketika Sultan HB X mengeluarkan Sabdatama pada hari Jumat, 6 Maret 2015 sebagai bentuk tanggapan terhadap perdebatan di DPRD DIY. Di dalam Sabdatama tersebut disebutkan bahwa siapapun dilarang untuk membicarakan suksesi Kraton Yogyakarta, baik dari internal kraton maupun dari unsur pemerintahan, karena kekuasaan tertinggi yang berhak membahas persoalan di Kerajaan Mataram hanya Raja. Isu ini selanjutnya berkembang pada perdebatan tentang peluang perempuan untuk menjadi Gubernur DIY.

Sultan HB X menganggap bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dapat memimpin kerajaan Mataram. Sementara itu, adik-adik menganggap bahwa sesuai adat istiadat Keraton Yogyakarta, raja Mataram harus seorang laki-laki, karena selain sebagai seorang raja, Sultan di Yogyakarta juga sekaligus pemimpin agama Islam.

Perdebatan ini semakin memanas ketika Sultan HB X mengeluarkan Sabda Raja pada 30 April 2015 yang mengubah gelar Sultan Hamengku Buwono. Pengubahan gelar yang dilakukan Sultan HB X membawa perubahan makna dan mengandung maksud "Buwono" hanya mengacu pada dunia fisik, sedangkan *bawono* bermakna lebih luas, perubahan ini bermaksud memperluas kekuasaan Sultan HB X sebagai pemimpin jagat fisik maupun spiritual. Kasedoso dan kasepuluh maknanya sama ('kesepuluh'), namun kasedoso (dari varian krama) lebih halus daripada kasepuluh (dari varian ngoko). Maksudnya, Sultan HB X menempatkan diri setara (egaliter) dengan rakyat (Subagyo, 2015).

Belum selesai permasalahan mengenai sabda raja yang pertama, Sabda Raja kedua dikeluarkan pada 5 Mei 2015, yang isinya adalah mengganti gelar putri pertama Sultan dari Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng Ing Mataram. Sebagian keluarga Keraton Yogyakarta, terutama adik-adik Sultan menolak Raja Perempuan menjadi penerus Sultan HB X.

Wacana tentang perdebatan dan konflik terkait pergantian tampuk kepemimpinan di Yogyakarta tersebut semakin meluas dan mendapatkan perhatian media dan masyarakat. Beberapa media massa nasional

dan lokal intensif memuat berita tentang konflik di keraton Yogyakarta, terutama masalah pemimpin perempuan. Masing-masing media memproduksi wacana terkait suksesi Keraton Yogyakarta dari kedua belah pihak yang berbeda pendapat dan kepentingan dengan menggunakan bahasa dan wacana yang berbeda.

Media memilih narasumber dari aktor-aktor sosial yang berkepentingan, seperti Sultan HB X, adik-adik Sultan (keluarga keraton), dan pemerintah (Negara). Ada pihak yang mendapatkan ruang wacana di media, namun ada pula pihak lain dihilangkan posisinya. Sebagaimana disampaikan Van Leeuwen dalam (Karman, 2015), bahwa wacana media menekankan pada representasi tindakan sosial (*social action*) dan aktor sosial (*social actor*). Media, menurut Van Leeuwen dapat melakukan strategi pelenyapan atau pengeluan (*exclusion*) dan strategi penghadiran (*inclusion*) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas wacana tertentu (Karman, 2015).

Sebagai bentuk dari produksi media, teks berita diwujudkan dalam bentuk bahasa. Hubungan antara bahasa dan media merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana bahasa adalah salah satu media bagi manusia dalam berkomunikasi. Penelitian mengenai teks berita dan bagaimana media mengkonstruksi realitas salah satunya adalah penelitian dari Karman dengan judul “Kontestasi Frame Surat Kabar Nasional dalam Liputan Aksi Bela Islam” (Karman, 2017).

Dalam penelitian Karman ini, menunjukkan bahwa media massa yang seharusnya menjaga ketertiban masyarakat dan keamanan Negara, namun pada praktiknya media justru terbelah sebagaimana ditunjukkan dalam bentuk *media framing*. Terdapat keberpihakan media pada satu masalah berdasarkan afiliasi ikatan psikologis (etnis, agama), dan timbul kesenjangan, bagaimana media seharusnya dan bagaimana fakta aslinya (Karman, 2017).

### **Bahasa, Wacana dan Kekuasaan**

Media massa saat ini bukan lagi lembaga yang bebas dan independen tetapi terkait dengan realitas sosial pada berbagai kepentingan yang bermain dalam media (Nugroho, 2019). Pemilihan kata, frasa, kalimat dan bahasa yang dimunculkan media kemudian dipandang sebagai produk manipulasi, dimana makna direproduksi dan definisi dirancang demi pembenaran atas kelompok dominan yang berkuasa.

Bahasa, dalam masyarakat modern telah berkembang tidak hanya sebagai media kontrol sosial dan kekuasaan, tetapi juga menyumbang proses dominasi terhadap orang lain oleh pihak lain (Fairclough, 2010). Menurut Foucault, wacana telah memproduksi pengetahuan, dan pengetahuan selalu menjadi senjata bagi kekuasaan, dimana wacana kekuasaan dan pengetahuan selalu hadir bersama (Foucault, 2008). Kekuasaan dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak terlihat karena ia hadir dalam setiap relasi sosial, dipraktikkan secara luas, menyebar dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Sedangkan Fairclough (2001:2) menyampaikan bahwa wacana merupakan praktik dari kontrol sosial dan kekuasaan. *Discourse* atau wacana melihat bahasa sebagai sebuah bentuk praktik sosial yang dapat digunakan untuk menunjukkan kekuasaan. Wacana dapat menjadi sarana untuk memarginalkan dan merendahkan kelompok yang tidak dominan dalam wacana. Melalui bahasa seseorang dapat ditampilkan secara baik ataupun buruk kepada khalayak. Bahasa tidak dimaknai sebagai sesuatu yang netral yang dapat mentransmisikan dan menghadirkan realitas seperti keadaan aslinya, melainkan ia sudah bermuatan kekuasaan. Bahasa juga dipahami sebagai tempat bersemayamnya ideologi (*the location of ideology*), dimana ideologi yang merupakan hasrat untuk berkuasa berwujud dalam bentuk fenomena bahasa (Fairclough, 2010: 57). Kekuasaan yang dituju berupa kekuasaan untuk mengontrol persepsi, pandangan, visi, dan juga cara pandang individu maupun kelompok sosial.

Bahasa menurut Gramsci dalam adalah salah satu bentuk pengorganisasian konsensus yang merupakan proses subordinasi kesadaran yang dibangun tanpa kekerasan (koersi), tapi dengan melandaskan pada budaya dan persuasi intelektual (Gramsci, 2006). Bahasa merupakan alat representasi yang ampuh dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan melalui hegemoni.

Dalam perspektif Gramsci, hegemoni dengan cara yang paling baik dipikirkan sebagai arena pertarungan yang berkesinambungan, dimana kaum elit dan kelas pekerja membangun relasi-relasi ekonomi, politik dan budaya dengan kelompok sosial lainnya (Fauziyah & Nasionalita, 2018). Pada arena pertarungan tersebut tujuan masing-masing adalah mengubah keseimbangan

dari kepentingan publik dan persepsi publik ke arah satu sisi kelompok.

Permasalahan suksesi kepemimpinan di Yogyakarta menjadi semakin menarik karena menimbulkan polemik mengenai pemimpin perempuan di keraton Yogyakarta. Munculnya polemik dan konflik ini memicu media massa di Indonesia, baik cetak maupun elektronik untuk mengangkatnya menjadi berita. Penelitian ini dilakukan dengan fokus pada pemberitaan mengenai isu penolakan pemimpin perempuan di Yogyakarta dalam surat kabar nasional Harian Kompas. Media nasional ini dipilih berdasarkan pertimbangan sejarah, ideologi dan distribusi (sirkulasi) media tersebut sampai dengan isu suksesi kepemimpinan di Yogyakarta menjadi perhatian media pada tahun 2015. Selain itu, juga berdasarkan intensitas pemberitaan isu suksesi kepemimpinan di Yogyakarta yang muncul dari harian Kompas dalam kurun waktu Maret sampai dengan Mei 2015.

Faktor lainnya yang menjadi pertimbangan pemilihan harian Kompas adalah ideologi Harian Kompas yang lekat dengan partai nasionalis. Sebagai media massa nasional, Kompas yang pertama kali terbit pada tanggal 28 Juni 1965, tak dapat dilepaskan dari sejarahnya yang tercatat sebagai koran yang berafiliasi ke Partai Katholik. Kelahiran Kompas yang membawa visi "humanisme transedental" dan kemudian berubah menjadi "Amanat Hati Nurani Rakyat" bermula dari usulan agar umat Katholik memiliki koran harian untuk mengimbangi media PKI pada waktu itu.

Sejarah kelahiran Kompas dan gaya pemberitaan yang ditampilkan tidak lepas dari kedekatan Kompas dengan partai nasionalis. Hamad (2004 : 74) menyampaikan sebagai media yang berafiliasi pada Partai Katholik di awal masa orde lama, Kompas kemudian dekat dengan partai nasionalis dan Kristen di awal masa orde baru, seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Meski pada awalnya Kompas dekat dan identik dengan Partai Katolik, karena Frans Seda dan PK Ojong adalah aktivis Partai Katolik, pada perkembangan selanjutnya Kompas mencoba menjaga jarak dari misi Katolik dan keluar dari ikatan-ikatan primordialisme sebagai usaha Kompas untuk menjaga netralitas berita dan pemeliharaan pasar (Hamad, 2004).

Pemberitaan terkait suksesi kepemimpinan di Yogyakarta pernah diteliti Nasionalita dan Nugroho (2020) dengan penelitian berjudul "*Media Agenda on Yogyakarta Sultanate Succession*". Dalam penelitian

tersebut, peneliti mengukur agenda media terkait isu suksesi Kesultanan di tiga media Kompas, Republika dan Kedaulatan Rakyat. Dengan metode analisis konten kuantitatif, penelitian ini membedah bagaimana media menempatkan dan menekankan masalah suksesi kepemimpinan Yogyakarta melalui konten berita (Nasionalita & Nugroho, 2020). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan Harian Kompas memproduksi teks berita terkait suksesi di Yogyakarta yang dapat dibagi dalam tiga isu utama, yaitu konflik internal keraton, peraturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, dan perubahan untuk suksesi Yogyakarta.

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti dari Karman (2015), Subagyo (2015) dan Nasionalita (2020) penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana surat kabar harian Kompas memproduksi teks berita terkait isu dan wacana penolakan pemimpin perempuan di Yogyakarta dari perspektif bahasa dan kekuasaan selama kurun waktu Maret sampai dengan Mei 2015. Penelitian juga berusaha mengungkap bagaimana hubungan antara ideologi media, dalam hal ini Kompas dengan aspek kebahasaan yang memproduksi wacana, serta bagaimana situasi sosial, politik, dan budaya yang menjadi latarbelakang aspek kebahasaan yang digunakan oleh harian Kompas.

Rentang waktu Maret sampai dengan Mei 2015 dipilih karena selama kurun waktu tersebut, isu dan perdebatan mengenai suksesi kepemimpinan di Yogyakarta begitu kuat dan mendapatkan perhatian banyak media dan masyarakat luas, terutama berkaitan dengan peristiwa penetapan Perda Keistimewaan Yogyakarta, Sabdatama, dan Sabda Raja pertama dan Sabda Raja kedua.

Dalam penelitian ini juga akan dibongkar seperti apa relasi kuasa antara media dengan aktor-aktor sosial yang terkait dalam isu suksesi kepemimpinan di Yogyakarta, terutama terkait dengan *power abused* dan ketidaksetaraan gender, serta bagaimana masing-masing pihak menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana disampaikan Fairclough (2010 : 235) bahwa analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) adalah sebuah metode yang berusaha melihat "ketidakberesan sosial" (*social wrong*) dari suatu teks berhubungan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dengan CDA memungkinkan penyelidikan rinci tentang hubungan bahasa dengan proses sosial lainnya, dan bagaimana

bahasa bekerja dalam hubungan kekuasaan Taylor (2004) dalam (Graham, 2011).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough yang melibatkan tiga tingkat analisis: (1) analisis teks atau textual (mikro), yaitu pendeskripsian mengenai teks; (2) analisis wacana atau *discourse practice* (meso), yaitu interpretasi hubungan antara proses produksi wacana dan teks; (3) analisis sosio-budaya atau *sociocultural practice* (makro), yaitu penjelasan hubungan antara proses wacana dengan proses sosial (Fairclough, 2001:21; 2010:132).

Analisis wacana kritis Fairclough dipilih sebagai metode penelitian karena memiliki langkah-langkah analisis yang jelas dan mampu menunjukkan pada saat kapan keberpihakan serta teoretisasi harus mulai dilakukan (Haryatmoko, 2015). Pada level internal teks, dengan analisis relasi semantik, relasi gramatikal, relasi leksikal, dan relasi fonologikal yang terdapat dalam kalimat, klausa dan frasa teks berita Harian Kompas. Pada level wacana (discourse level) mengkaji teks sebagai genre, sebagai wacana (discourse), dan dalam hal gaya (style). Pada level eksternal (macro level) teks berita dianalisa dari sejumlah tingkatan, yakni dalam situasi langsung (situational), dalam institusi atau organisasi yang lebih luas (institutional), dan pada tingkat masyarakat yang lebih luas (societal).

Data penelitian berupa teks berita yang diproduksi Harian Kompas terkait pemimpin perempuan di Yogyakarta dalam kurun waktu dari Maret 2015 hingga Mei 2015. Dari hasil observasi teks berita di Litbang Kompas Jakarta, peneliti menemukan duapuluh (20) teks berita terkait suksesi kepemimpinan di Yogyakarta. Kemudian peneliti memilah dan memilih teks berita yang menyampaikan isu pemimpin perempuan, dan didapatkan tiga teks berita.

Ketiga teks berita tersebut adalah (1) “*DPRD DIY Belum Dapat Titik Temu, Prabukusumo : Raja Yogyakarta Harus Laki-Laki*”, (2) “*DPRD Pertimbangkan Masukan \*Masih Ada Beda Pendapat Gubernur DIY Harus Dijabat Laki-laki*” dan (3) “*Sultan: Perempuan Masih Berpeluang, GKR Hemas: Tidak Boleh Ada Diskriminasi*”.

Setelah tahapan analisis teks berita tersebut, peneliti kemudian melakukan pembahasan dengan teori bahasa, wacana dan kekuasaan dari Michel

Foucault dan Norman Fairclough. Dari hasil elaborasi analisis teks dan pembahasan dengan teori, didapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Level Teks (*Micro Level*)

#### Teks Berita Pertama “*DPRD DIY Belum Dapat Titik Temu, Prabukusumo : Raja Yogyakarta Harus Laki-Laki*” (10 Maret 2015)

Teks berita ini menyampaikan penafsiran Raperdais dan UU Keistimewaan Yogyakarta mengenai syarat calon Gubernur DIY, dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan anggota DPRD DIY. Pada awal berita Harian Kompas menyampaikan perdebatan mengenai revisi pasal dalam Raperdais yang menyatakan calon Gubernur dan calon Wagub DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Secara tidak langsung, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dijabat laki-laki, sehingga menimbulkan perdebatan. Sebagaimana disampaikan Harian Kompas pada paragraf pertama berita :

“*Sebagian anggota DPRD DIY ingin merevisi aturan bahwa Gubernur DIY harus laki-laki, sementara sebagian lainnya ingin aturan tersebut dipertahankan*” (Harian Kompas, 10 Maret 2015).

Pada kalimat ini terdapat relasi gramatikal dimana frasa “*sebagian anggota*” sebagai subjek disampaikan untuk memberikan informasi bahwa tidak seluruh anggota DPRD setuju dengan syarat calon Gubernur harus laki-laki. Harian Kompas juga memberikan relasi makna fonologikal dengan frasa “*harus laki-laki*” yang menekankan pada syarat calon Gubernur DIY. Penegasan ini dilakukan Harian Kompas terkait perdebatan antar anggota DPRD DIY yang mempermasalahkan syarat calon Gubernur DIY dalam Raperdais yang merujuk pada UU Keistimewaan Yogyakarta.

Hal ini kembali ditegaskan Harian Kompas pada paragraf selanjutnya dengan kalimat “*Apalagi, Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X tidak memiliki anak laki-laki*”. Pada teks berita ini Harian Kompas menyampaikan relasi makna semantik berupa kata “*apalagi*” untuk menjelaskan relasi perdebatan syarat calon Gubernur DIY yang akan dijabat oleh Raja Keraton Yogyakarta yang kebetulan tidak memiliki anak laki-laki. Isu tentang jenis kelamin calon Gubernur DIY ini menjadi perdebatan karena Sultan

HB X tidak memiliki anak laki-laki. Hal ini disampaikan Harian Kompas dengan relasi makna gramatikal berupa frasa “Raja Keraton” dan “anak laki-laki” yang dideskripsikan seolah saling berkaitan dalam konteks pergantian pemegang kekuasaan.

Permasalahan ini yang akhirnya memicu perdebatan mengenai revisi aturan dalam Raperdais yang bunyinya sama persis dengan Pasal 18 huruf m UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terkait hal ini beberapa anggota dewan di DPRD DIY mengusulkan untuk merevisi aturan terkait jenis kelamin calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dianggap tidak mengakomodir hak warga negara berjenis kelamin perempuan. Harian Kompas menyampaikan hal ini pada kalimat berikut :

*“Mereka mengusulkan penambahan kata suami sehingga pasal itu berbunyi ”calon gubernur dan calon wagub DIY wajib menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri/suami, dan anak”* (Harian Kompas, 10 Maret 2015)

Frasa “kata suami” dan “istri/suami” memiliki relasi makna leksikal bahwa penambahan kata “suami” menjadi sangat penting karena berarti tidak hanya laki-laki yang dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan revisi itu maka tidak ada lagi ketentuan bahwa Gubernur DIY harus dijabat laki-laki. Selanjutnya Harian Kompas menyampaikan masalah kesamaan hak laki-laki dan perempuan untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mengutip pernyataan langsung dari Wakil Ketua DPRD DIY dari Fraksi Gerindra Dharma Setiawan sebagai berikut :

*“Sabda tama memberi garis batas yang jelas antara kewenangan DPRD DIY dan wewenang Keraton Yogyakarta. DPRD DIY sama sekali tak punya wewenang menentukan calon raja dan bahkan tidak bisa berkomentar apakah calon raja harus laki-laki atau perempuan”* (Harian Kompas, 10 Maret 2015)

Pada teks berita ini Harian Kompas menyampaikan hubungan dalam relasi leksikal berupa frasa-frasa “sabda tama”, “garis batas”, “kewenangan DPRD DIY” dan “wewenang Keraton Yogyakarta” yang membentuk kesatuan makna bahwa ada batas antara kewenangan DPRD DIY sebagai pemegang kekuasaan legislatif di Propinsi DIY dengan kewenangan Keraton Yogyakarta untuk menentukan calon Gubernur yang berasal dari calon Raja. Frasa “garis batas” ini memberikan penegasan wilayah kekuasaan dan

wewenang DPRD DIY dengan Raja Keraton Yogyakarta dalam menentukan suksesi di Yogyakarta.

Selanjutnya Harian Kompas menuliskan pendapat dari pihak yang tidak setuju dengan perubahan atas Raperdais yang secara tidak langsung mensyaratkan laki-laki sebagai calon Gubernur dan Wagub DIY dengan mengutip pendapat dari adik Sultan HB X, GBPH Prabukusumo :

*“...mendorong DPRD DIY tidak merevisi aturan yang menyatakan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki. Selain sejalan dengan UU Keistimewaan DIY, aturan itu juga sesuai dengan paugeran atau adat istiadat Keraton Yogyakarta yang mengharuskan Raja Keraton Yogyakarta dijabat laki-laki”* (Harian Kompas, 10 Maret 2015)

Pada teks berita ini Harian Kompas menyampaikan kalimat kutipan tidak langsung dari adik Sultan HB X dengan relasi makna fonologikal berupa klausa “Gubernur DIY harus dijabat laki-laki”. Penekanan pada intonasi penyebutan klausa tersebut memberikan penegasan mengenai penolakan terhadap perempuan untuk menjadi Gubernur DIY karena tidak sesuai dengan aturan pemerintah (Raperdais dan UU Keistimewaan). Pada kalimat selanjutnya terdapat relasi leksikal berupa kata “paugeran” yang merujuk pada adat istiadat Keraton Yogyakarta yang berpegang pada kebiasaan selama ini dimana Raja dijabat oleh laki-laki. Selain itu juga terdapat makna gramatikal dimana “paugeran” sebagai subjek yang mempengaruhi objek langsung “Raja Keraton Yogyakarta” dan objek tidak langsung “laki-laki” yang dapat dipahami dimana “paugeran” menjadi dasar untuk menentukan pewaris tahta Keraton Yogyakarta selanjutnya.

Untuk menguatkan pemegang jabatan Raja Keraton Yogyakarta harus laki-laki, pada paragraf akhir teks berita, Harian Kompas menuliskan kutipan langsung dari narasumber GBPH Prabukusumo yang menyampaikan :

*“Paugeran Keraton Yogyakarta jelas menyatakan raja harus dijabat laki-laki. Adat istiadat itu tidak bisa direvisi.”* (Harian Kompas, 15 Maret 2015)

Pendapat dari adik Sultan HB X yang menolak adanya revisi aturan terkait calon Gubernur DIY disampaikan dengan relasi makna gramatikal pada kalimat awal teks berita ini. Frasa “Paugeran Keraton Yogyakarta” kembali menjadi subjek yang berhubungan secara langsung dengan objek “raja” dan objek tidak langsung “laki-laki”, yang artinya secara

langsung pengganti Sultan HB X nantinya harus mengikuti “paugeran” atau adat istiadat yang selama ini telah berlaku di Keraton Yogyakarta.

Kemudian pada kalimat selanjutnya terdapat relasi fonologikal berupa kalimat penegas “*Adat istiadat itu tidak bisa direvisi*” sebagai bentuk penolakan adik Sultan HB X terhadap perubahan adat istiadat terkait pengisian jabatan Raja Keraton Yogyakarta.

**Teks Berita Kedua “DPRD Pertimbangkan Masukan, Masih Ada Beda Pendapat Gubernur DIY Harus Dijabat Laki-laki” (12 Maret 2015)**

Dari judul teks berita ini terlihat jelas bagaimana Harian Kompas menyampaikan masih terjadi perdebatan terkait isu apakah perempuan dapat menjadi Gubernur DIY. Pada awal teks berita Harian Kompas menyampaikan sikap DPRD DIY terkait perdebatan tentang syarat calon Gubernur DIY yang mengharuskan dijabat oleh laki-laki.

Permasalahan penolakan terhadap pemimpin perempuan menyangkut suksesi kepemimpinan di Yogyakarta disampaikan Harian Kompas pada teks berita ini dengan kutipan dari Sultan HB X yang meminta revisi pasal tentang ketentuan calon Gubernur DIY dalam Raperdasi, sebagaimana disampaikan dalam kalimat :

“*Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi sehingga memungkinkan perempuan menjabat gubernur*” (Harian Kompas, 12 Maret 2015).

Pada kalimat ini harian Kompas mencoba menyampaikan bahwa perdebatan mengenai revisi pasal Raperdais salah satunya berasal dari Sultan HB X. Dengan relasi makna gramatikal, Harian Kompas menuliskan “*Sultan*” sebagai subjek yang meminta revisi terhadap objek langsung “*pasal*”, dan pada akhirnya akan berimplikasi terhadap objek tak langsung “*perempuan*”. Sehingga dapat diketahui dalam teks berita ini terdapat hubungan antara Sultan dengan pasal dan perempuan terkait dengan syarat calon Gubernur DIY.

Selanjutnya Harian Kompas menyajikan teks berita berupa kalimat kutipan langsung dari narasumber Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan sebagai berikut :

“*Sabda tama Sultan merupakan pendapat final dari Keraton Yogyakarta terkait Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wagub. Karena itu, ia meminta anggota DPRD DIY tidak lagi mempertimbangkan pendapat kerabat keraton yang*

*bertentangan dengan sabda tama*” (Harian Kompas, 12 Maret 2015)

Pada kalimat pertama teks berita di atas terdapat relasi makna leksikal berupa frasa “*pendapat final*” dapat diartikan sebagai keputusan akhir dari Sultan yang diwujudkan dalam bentuk Sabdatama. Keputusan Sultan terkait beberapa hal yang berhubungan dengan pengisian tahta Raja Keraton Yogyakarta dan jabatan Gubernur DIY secara tersirat dalam Sabda tama memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjabat. Kemudian dengan relasi semantik berupa frasa “*karena itu*” yang menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat selanjutnya dimana Sabda tama dari Sultan seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi anggota DPRD DIY untuk merevisi Raperdais.

Pada paragraf akhir teks berita ini, Harian Kompas juga menyampaikan pendapat dari kalangan masyarakat dengan mengutip pernyataan narasumber Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, Sukiman Hadiwijoyo yang menyatakan “*mendukung aturan bahwa Gubernur DIY harus dijabat laki-laki*”. Hal ini disampaikan Harian Kompas untuk menunjukkan bahwa perdebatan mengenai suksesi kepemimpinan di Keraton Yogyakarta mulai melebar ke kalangan masyarakat di wilayah Propinsi Yogyakarta. Relasi gramatikal yang dibangun Harian Kompas dalam kalimat ini adalah Ketua Paguyuban Dukuh sebagai subjek, frasa “*Gubernur DIY*” sebagai objek langsung dan kata “*laki-laki*” sebagai objek tak langsung. Relai ini dibangun untuk menunjukkan suara masyarakat yang mendukung aturan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki.

**Teks Berita Ketiga “Sultan: Perempuan Masih Berpeluang, GKR Hemas: Tidak Boleh Ada Diskriminasi” (2 April 2015)**

Teks berita selanjutnya, Harian Kompas memberikan penekanan pada judul berita terkait kesempatan perempuan untuk dapat menjadi pemimpin di Yogyakarta. Relasi makna fonologikal berupa frasa “*perempuan masih berpeluang*” menunjukkan bahwa anak-anak Sultan dapat menjadi pewaris tahta Keraton Yogyakarta, yang sekaligus menjadi pejabat Gubernur DIY. Relasi fonologikal lainnya juga digunakan Harian Kompas pada judul berita dengan frasa “*tidak boleh ada diskriminasi*”, yang merupakan pendapat dari GKR Hemas yang merupakan istri Sultan HB X. Diskriminasi yang dimaksud dalam frasa ini adalah hak

yang sama bagi kaum perempuan untuk dapat menjadi pemimpin di Yogyakarta.

Teks berita ini disampaikan Harian Kompas menanggapi disahkannya Perdas Yogyakarta oleh Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY pada Selasa 31 Maret 2015. Pengesahan dilakukan sesudah perdebatan syarat calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) yang tercantum dalam Perdas yang oleh sebagian kalangan ditafsirkan syarat untuk menjadi calon Gubernur DIY harus laki-laki. Harian Kompas menyampaikan teks berita berikut untuk memberikan gambaran mengenai Pasal 3 Ayat 1 Huruf m yang menyatakan :

*Calon gubernur dan calon wagub DIY harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Bunyi pasal itu sama persis dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf m UU Keistimewaan DIY.* (Harian Kompas, 2 April 2015)

Berdasarkan teks yang ada, perbedaan pendapat masih terlihat dengan adanya pro dan kontra mengenai aturan yang mengharuskan calon Gubernur DIY menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat salah satunya adalah "*riwayat istri*". Dengan relasi gramatikal, Harian Kompas menyampaikan hubungan antara "pasal 3 Ayat 1 huruf m" sebagai subjek yang merupakan aturan dalam Perdas, dan frasa "calon gubernur dan calon wagub DIY" sebagai objek langsung yang diatur dalam pasal, kemudian "daftar riwayat hidup" sebagai objek tak langsung yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur DIY.

Pada paragraf teks berita selanjutnya Harian Kompas menyampaikan pendapat dari Sultan HB X terkait aturan dalam Perdas tersebut dengan

*"Menurut Sultan, Pasal 3 Ayat 1 Huruf m Perdas tidak mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki. Pasal itu dinilai hanya mengatur persyaratan administratif seorang calon gubernur dan wagub. Apalagi, di dalam pasal itu terdapat frasa "antara lain" sehingga dapat diartikan itu tak mengatur secara detail isi daftar riwayat hidup calon gubernur dan wagub"* (Harian Kompas, 2 April 2015)

Dari teks ini, dapat diamati bahwa Harian Kompas menyampaikan pendapat Sultan HB X dalam kalimat tidak langsung yang menyatakan bahwa Perdas tidak mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki. Terdapat hubungan leksikal dalam kalimat ini berupa frasa "*menurut Sultan*" yang menunjukkan

bahwa pernyataan mengenai Gubernur dan Wagub dapat dijabat laki-laki murni merupakan pendapat dan penafsiran Sultan terhadap aturan pasal 3 ayat 1 huruf m Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada teks berita ini Harian Kompas mencoba menyampaikan kepada pembaca bahwa permasalahan gender yaitu harus laki-laki belum dapat diakui kebenaran tafsirnya. Hal ini dikarenakan terdapat diksi "antara lain" yang dapat diartikan tidak mewajibkan calon Gubernur dan Wagub DIY untuk menyerahkan daftar riwayat hidup "istri". Hal ini yang menurut Sultan HB X masih memungkinkan perempuan untuk menjabat sebagai Gubernur dan Wagub DIY.

Paragraf teks berita selanjutnya Harian Kompas mengutip pernyataan dari narasumber Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang juga istri Sultan HB X yang memberikan pernyataan sebagai berikut :

*"tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan dalam jabatan gubernur karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, perempuan bisa saja jadi gubernur"* (Harian Kompas, 2 April 2015)

Terdapat relasi fonologikal dalam teks berita ini berupa klausa "tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan" yang dapat ditafsirkan sebagai pernyataan perempuan yang menolak diskriminasi terkait hak untuk menjabat Gubernur dan Wagub DIY. Pendapat mengenai hak perempuan untuk meneruskan tampuk kepemimpinan di Yogyakarta dilanjutkan Harian Kompas pada paragraf berikutnya yang merupakan pendapat dari GKR Hemas bahwa "*semua pihak, termasuk DPRD DIY, tidak boleh membatasi hak Sultan Hamengku Buwono X menunjuk penerusnya sebagai raja*". Adanya kalimat semantik ini menunjukkan bahwa penentuan kepemimpinan selanjutnya berada pada kuasa Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta.

#### **Analisis Level Wacana (Micro Level)**

Pada teks berita pertama yang berjudul "*Prabukusumo : Raja Yogyakarta Harus Laki-Laki*", terdapat tiga bentuk genre digunakan Harian Kompas untuk menyampaikan wacana ini, yakni laporan kejadian, editorial dan kutipan hasil wawancara, yang kesemuanya terkait dengan aturan tentang keharusan Raja Yogyakarta dan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Wacana Gubernur DIY dan Raja Keraton Yogyakarta harus laki-laki menjadi wacana dominan yang



disampaikan Harian Kompas dengan berbagai bentuk *discourse*.

Wawancara dengan beberapa pihak yang setuju dengan keharusan Raja sekaligus Gubernur DIY laki-laki dilakukan Harian Kompas dengan beberapa narasumber berbeda untuk menekankan wacana penolakan terhadap pemimpin perempuan. Dengan gaya Bahasa (*style*) dari adik Sultan sebagai representasi bangsawan (kerabat) keraton, wacana penolakan pemimpin perempuan ini disampaikan dalam kalimat deklaratif seruan.

**Tabel 1** Produksi Wacana Penolakan Pemimpin Perempuan Pada Teks Berita Pertama

Jenis Wacana	Temuan	Keterangan
Genre	Sebagian anggota DPRD DIY ingin merevisi aturan bahwa Gubernur DIY harus laki-laki, sementara sebagian lainnya ingin aturan tersebut dipertahankan	Laporan kejadian
	Secara tidak langsung, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki.	Editorial
Discourse	“Selain sejalan dengan UU Keistimewaan DIY, aturan itu juga sesuai dengan paugeran atau adat istiadat Keraton Yogyakarta yang mengharuskan Raja Keraton Yogyakarta dijabat laki-laki”	Hasil wawancara narasumber GBPH Prabukusumo
	“Paugeran Keraton Yogyakarta jelas menyatakan raja harus dijabat laki-laki”	Hasil wawancara narasumber GBPH Prabukusumo
Style	Kalimat deklaratif dan kalimat seruan	Perwakilan adik-adik Sultan Gaya bahasa bangsawan keraton atau pemimpin

Pada teks berita kedua yang berjudul “DPRD DIY Pertimbangkan Masukan, Masih Ada Beda Pendapat Gubernur DIY Harus Dijabat Laki-Laki” ini Harian Kompas kembali melakukan pengulangan kalimat yang sama dengan teks berita sebelumnya. Pengulangan kalimat ini adalah *genre* yang berupa editorial redaksi sebagai bentuk wacana penolakan pemimpin perempuan. Harian Kompas juga menyajikan wacana ini dalam bentuk laporan kejadian dan kutipan hasil wawancara dengan narasumber.

Satu orang narasumber dari organisasi Paguyuban Dukuh DIY menjadi *discourse* untuk menyampaikan dukungan pada wacana Gubernur DIY harus laki-laki. Dengan gaya bahasa seorang pemimpin organisasi, narasumber menyampaikan kalimat deklaratif yang secara tersirat menolak pemimpin perempuan di Yogyakarta. Secara keseluruhan, teks berita ini

menegaskan wacana penolakan terhadap pemimpin perempuan.

**Tabel 2.** Produksi Wacana Penolakan Pemimpin Perempuan Pada Teks Berita Kedua

Jenis Wacana	Temuan	Keterangan
Genre	Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X berpendapat, tidak ada aturan yang mengharuskan Gubernur dijabat laki-laki	Hasil wawancara narasumber Sultan HB X
	UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan aturan turunannya tidak mewajibkan DIY dipimpin laki-laki	Hasil wawancara narasumber Sultan HB X
	Sebagian kalangan menafsirkan, pasal itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki	Editorial
	Menurut Sultan, Pasal 3 ayat 1 huruf m Perdais tidak mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki	Hasil wawancara narasumber Sultan HB X
Discourse	Apalagi, Sultan Hamengku Buwono X tak memiliki anak laki-laki, sementara Raja Yogyakarta selama ini laki-laki	Editorial
	Menurut saya, perempuan bisa jadi gubernur	Hasil wawancara GKR Hemas Raja Keraton Yogyakarta Gubernur DIY Permaisuri Sultan HB X, Wakil Ketua DPD RI
Style	Sultan HB X	Gaya bahasa seorang pemimpin
	GKR Hemas	
	Kalimat pernyataan argumentatif	

Teks berita terakhir yang mewacanakan pemimpin perempuan di Yogyakarta disampaikan Harian Kompas dengan berita berjudul Sultan : Perempuan Masih Berpeluang, GKR Hemas : Tidak Boleh Ada Diskriminasi. Pada teks berita ini Harian Kompas mewacanakan pemimpin perempuan di Yogyakarta dengan *genre* kutipan hasil wawancara narasumber dan editorial redaksi terkait aturan yang tidak mengharuskan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Dengan *discourse* yang merupakan representasi kepentingan Raja dan Gubernur DIY, beberapa kalimat pada teks berita ini mewakili suara pihak yang setuju dengan wacana pemimpin perempuan.

Namun, Harian Kompas juga tetap menyampaikan *genre* berupa editorial yang mendukung pihak-pihak yang menolak pemimpin perempuan. Kalimat-kalimat dari narasumber pada teks berita ini lebih banyak berupa pernyataan argumentatif terkait aturan-aturan yang tidak menghalangi perempuan untuk dapat menjadi Gubernur DIY. Gaya bahasa seorang pemimpin yang santun dan disertai penafsiran hukum disampaikan untuk menjelaskan alasan perempuan dapat menjadi pemimpin (Raja sekaligus Gubernur) di Yogyakarta.

Dari tiga teks berita yang berisi wacana pemimpin perempuan di Yogyakarta, terlihat jelas Harian Kompas lebih banyak menyampaikan penolakan terhadap hal ini. Dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada pihak yang menolak pemimpin perempuan, maka wacana yang berkembang di Harian Kompas lebih banyak tentang keharusan Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur DIY dijabat laki-laki. Bahkan terdapat dua kalimat yang sama disampaikan oleh Harian Kompas dalam tiga teks berita yang berbeda, terkait penolakan terhadap pemimpin perempuan.

Dua kalimat, “*Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi sehingga memungkinkan perempuan jadi Gubernur atau Wagub DIY*”, dan “*Secara tidak langsung, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki*” diproduksi Harian Kompas masing-masing dua kali dalam teks berita yang berbeda dan waktu terbit yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa Harian Kompas melakukan produksi teks dengan bahasa yang cenderung menolak pemimpin perempuan di Yogyakarta.

**Tabel 3.** Produksi Wacana Penolakan Pemimpin Perempuan Pada Teks Berita Ketiga

Jenis Wacana	Temuan	Keterangan
	<i>Secara tidak langsung, aturan itu mengharuskan Gubernur dan Wagub DIY dijabat laki-laki.</i>	Editorial (Pengulangan kalimat pada teks berita sebelumnya)
	<i>Dalam beberapa kesempatan, Sultan yang juga Gubernur DIY meminta pasal itu direvisi sehingga memungkinkan perempuan menjabat gubernur</i>	Editorial
Genre	<i>Namun, usulan itu ditentang tiga adik Sultan karena revisi aturan itu akan memungkinkan Raja Keraton Yogyakarta dijabat perempuan. Ketiganya beranggapan, Raja Keraton Yogyakarta harus dijabat laki-laki.</i>	Laporan kejadian
	<i>Paguyuban dukuh DIY, Semar Sembogo, Rabu kemarin, mengeluarkan pernyataan yang mendukung aturan bahwa Gubernur DIY harus dijabat laki-laki.</i>	Laporan kejadian
	<i>Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY secara tidak langsung juga menyatakan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki.</i>	Wawancara narasumber Ketua Semar Sembogo. Sukiman Hadiwijoyo
Discourse	Sukiman Hadiwijoyo	Mewakili Paguyuban Dukuh DIY, Semar Sembogo
Style	Kalimat deklaratif	Gaya bahasa pemimpin kelompok masyarakat

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Stuart Hall bahwa media memegang kekuasaan dan memiliki keleluasaan untuk membangun realitas yang diinginkan sekaligus melakukan membenaran (Hall, 2003a). Dalam hal ini Harian Kompas memproduksi teks berita terkait pemimpin perempuan di Yogyakarta untuk membangun realitas bahwa lebih banyak masyarakat dan tokoh masyarakat di Yogyakarta yang menolak hal ini. Harian Kompas melakukan reproduksi definisi mengenai berbagai tindakan dan kondisi yang menguatkan legitimasinya bahwa Raja Keraton Yogyakarta dan Gubernur DIY harus dijabat laki-laki.

Kebijakan redaksi Harian Kompas ini bertentangan dengan salah satu misi perusahaan untuk menjaga kualitas informasi dan bobot jurnalistik dengan upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional. Terkait hal ini, dengan memberikan ruang yang timpang pada pendapat yang menolak pemimpin perempuan, Harian Kompas tidak mampu menjaga kualitas informasi yang disampaikannya kepada khalayak. Bahkan dengan pengulangan kalimat yang sama persis dalam teks berita yang berbeda, Harian Kompas tak mampu menjaga bobot jurnalistik dengan pendekatan intelektual.

Kalimat-kalimat dan bahasa yang diproduksi Harian Kompas lebih banyak memberikan dukungan terhadap pihak yang setuju Raja dan Gubernur di Yogyakarta harus laki-laki. Misi Harian Kompas untuk selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi kritis dan teguh pada prinsip, terlupakan ketika dihadapkan pada wacana pemimpin perempuan di Yogyakarta.

Wacana mengenai persamaan hak perempuan dengan laki-laki yang banyak disampaikan dalam kehidupan masyarakat modern selama ini kurang mendapatkan porsi yang cukup dari Harian Kompas. Produksi wacana mengenai perempuan yang dapat berpartisipasi dan berperan dalam kehidupan politik dan pemerintahan tampaknya kurang menjadi perhatian Harian Kompas. Cita-cita Harian Kompas untuk dapat menjadi media yang bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang berkembang tidak tampak pada wacana pemimpin perempuan di Yogyakarta.

### Analisis Level Sosiokultural (Macro Level)

Produksi teks dan wacana yang dilakukan Harian Kompas tak dapat dilepaskan dari situasi sosial, politik dan kultural masyarakat di Yogyakarta pada saat teks disampaikan kepada publik. Isu-isu yang diangkat

beserta wacana yang dikembangkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang melingkupinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta sebagai salah satu propinsi dengan status “istimewa” di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sebagai lembaga budaya sekaligus lembaga politik.

Konteks sosio-kultural dalam penelitian ini terkait dengan bagaimana media memilih wacana-wacana dalam pemberitaan terkait isu suksesi kepemimpinan di Yogyakarta. Harian Kompas memilih aktor-aktor sosial dan politik sebagai narasumber berita tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Sebagaimana disampaikan Fairclough (2010) sebuah wacana tertanam dalam praktik sosiokultural di sejumlah tingkatan, yaitu dalam situasi langsung (*situational*), dalam institusi atau organisasi yang lebih luas (*institutional*), dan pada tingkat masyarakat (*societal*) (Fairclough, 2013).

Dalam penelitian ini, kita dapat membaca interaksi antara Sultan dengan adik-adiknya dalam kaitannya dengan hubungan khusus mereka sebagai saudara sedarah. Namun dapat pula kita lihat hubungan antara Sultan dengan adik-adiknya dalam keraton Yogyakarta sebagai sebuah institusi, atau hubungan antara pemimpin dengan bawahan dalam masyarakat yang lebih luas.

Struktur sosial, menurut Fairclough (2010) adalah entitas abstrak yang mendefinisikan potensi, yaitu sekumpulan kemungkinan. Namun, hubungan antara apa yang mungkin secara struktural dan apa yang sebenarnya terjadi, yaitu antara struktur dan peristiwa, adalah hubungan yang sangat kompleks. Praktik sosial dapat dianggap sebagai cara untuk mengontrol pemilihan kemungkinan struktural tertentu dan mengesampingkan yang lain, dan mempertahankan pilihan tersebut dari waktu ke waktu, di bidang kehidupan sosial tertentu (Fairclough, 2010).

Sebagai sebuah kerajaan, Keraton Yogyakarta telah ada sejak didirikan Sultan Hamengku Buwono I setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti yang berisi pembagian kekuasaan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara historis Yogyakarta mempunyai sejarah yang berbeda dengan daerah-daerah lain ketika akan berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta terintegrasi ke dalam Republik Indonesia melalui Maklumat 5 September 1945. Dalam maklumat tersebut, jelas dikatakan bahwa Yogyakarta adalah bersifat kerajaan

dan berstatus istimewa dan menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia.

Namun dalam perkembangannya implementasi sistem pemerintahan yang dibangun tidaklah bersifat kerajaan atau monarki. Keraton Yogyakarta sendiri telah mengubah atau mereformasi diri dalam hal mengimplementasikan sistem pemerintahan yang menuju modernisasi, tapi tidak meninggalkan kearifan atau budaya lokal yang sudah ada dan berkembang (Asichin & Rochwulaningsih, 2018). Selain diakui sebagai lembaga budaya, Keraton Yogyakarta sekaligus sebagai lembaga politik dimana Sultan selain sebagai raja juga sekaligus sebagai Kepala Daerah (Gubernur) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain hal tersebut di atas, situasi politik dalam kaitannya dengan pemberitaan di atas adalah bahwa pada saat teks diproduksi, situasi politik di Yogyakarta sedang hangat terkait perdebatan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Yogyakarta. Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak mengenal pemilihan kepala daerah (gubernur) secara langsung menjadi menarik perhatian masyarakat. Keistimewaan yang dimiliki Propinsi Yogyakarta ini menjadi perbincangan oleh masyarakat dan media ketika Sultan Hemengku Buwono X tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris tahta keraton Yogyakarta, sekaligus penerus kekuasaan politik sebagai Gubernur di DIY.

Situasi sosial dan politik yang terjadi ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan dan memancing opini masyarakat tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan Sultan Hamengku Buwono X jika kelak beliau meninggal dunia. Konteks situasional (*situational context*) ini mejadi salah satu praktik sosial yang dihubungkan dengan peristiwa atau teks yang diproduksi Harian Kompas oleh wacana penolakan terhadap pemimpin perempuan di Yogyakarta.

Hal ini menjadi situasi sosial yang terkait dengan budaya politik dan kekuasaan Jawa. Anderson (2000 : 43) menyampaikan bahwa budaya politik Jawa adalah suatu kompleks unsur-unsur Barat dan tradisional yang heterogen, terpisah-pisah dan secara internal kontradiktif dengan logika dan kesalingterikatan internal yang lebih rendah dibandingkan dengan masa lalu. Perpaduan unsur Barat dan tradisional tersebut melanggengkan system politik patriarkal yang telah berlangsung sejak masa Sultan HB I sebagai pendiri Kasultanan Yogyakarta.

## Pembahasan

Harian Kompas sebagai surat kabar harian nasional menaruh perhatian yang cukup besar terhadap isu suksesi kepemimpinan di Yogyakarta. Permasalahan pergantian kepemimpinan di Yogyakarta ini menjadi menarik karena orang yang menjadi pengganti Sultan HB X akan memegang dua kekuasaan sekaligus. Sebagai raja Kasultanan Yogyakarta, Sultan adalah penguasa kultural, sekaligus sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang memegang kekuasaan politik.

Seiring berjalannya waktu Sultan HB X dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa Kasultanan Yogyakarta harus dapat mengikuti perkembangan jaman, dimana Kasultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia harus tunduk pada ketentuan konstitusi yang berlaku. Sultan HB X juga meminta masyarakat Yogyakarta seharusnya dapat terbuka dalam menerima demokrasi dan kesetaraan gender, dimana wanita mempunyai hak untuk menjadi pemimpin.

Dari hasil analisis teks berita dan produksi wacana yang dilakukan Harian Kompas kemudian berkembang ke arah penolakan terhadap pemimpin perempuan. Sebagaimana disampaikan Michel Foucault bahwa setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri, dimana setiap tipe wacana diterima dan berfungsi sebagai kebenaran (Foucault, 2008). Dalam hal ini Harian Kompas menciptakan rezim kebenarannya terkait wacana penolakan pemimpin perempuan di Yogyakarta.

Selain terkait struktur dan situasi sosial, wacana juga dipengaruhi oleh praktik sosial (*social practice*) yang ada dimana teks berita diproduksi. Praktik sosial merupakan interpretasi dari praktik wacana. Setiap teks dalam wacana dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki institusi. Meski tidak berkaitan secara langsung, tetapi dapat ditarik benang merah atas produksi wacana oleh Harian Kompas, erat kaitannya dengan keberadaan Kompas sebagai media nasional yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu wilayah potensial bagi Harian Kompas, karena di Yogyakarta berkumpul ribuan mahasiswa dan pelajar dari seluruh provinsi di Indonesia.

Yogyakarta adalah miniatur Indonesia yang bernilai ekonomi dan politik tinggi. Dengan menguasai masyarakat Yogyakarta secara sosial dan kultural, Harian Kompas akan semakin dikenal dan

berkembang. Apalagi mengingat Kompas Gramedia Group yang juga memiliki usaha berbagai bidang, termasuk perhotelan, ritel buku, radio dan televisi. Dalam wacana-wacana terkait suksesi kepemimpinan Yogyakarta, secara tersurat dan tersirat Harian Kompas lebih banyak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang kontra dengan Sultan HB X. Bahasa dan wacana yang disampaikan Harian Kompas juga terlihat lebih banyak memihak pada pihak yang menolak perempuan untuk menjadi pemimpin di Yogyakarta. Salah satu cara untuk melanggengkan kuasa menurut Foucault adalah penggunaan bahasa dan wacana sesuai dengan kehendak dan kepentingan penguasa (Foucault, 2008).

Wacana penolakan pemimpin perempuan di Yogyakarta ini mendapatkan ruang representasi yang besar dari Harian Kompas. Kekuasaan dan politik juga seringkali bermain dengan dalam tataran klaim atau pengakuan. Dalam permasalahan suksesi kepemimpinan di Yogyakarta ini muncul pula klaim bahasa, yakni bahasa yang membawa muatan kepentingan kekuasaan. Klaim atas nama adat istiadat (*paugeran*) berhadapan dengan klaim kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di Yogyakarta. Dari penggunaan bahasa dan wacana yang disampaikan, Harian Kompas lebih banyak memberikan ruang bagi klaim-klaim atas nama *paugeran* yang tidak menghendaki Yogyakarta dipimpin seorang perempuan.

Terkait struktur sosial yang ada di Yogyakarta, Harian Kompas lebih berpihak pada wacana penolakan pemimpin perempuan karena dianggap tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku selama ini di Keraton Yogyakarta. Sebagaimana diketahui, sejak Sultan Hamengku Buwono I hingga Hamengku Buwono X, Keraton Yogyakarta dipimpin oleh raja laki-laki. Selain itu, gelar Sultan di Yogyakarta secara tersurat diinterpretasikan bahwa Sultan selain sebagai raja juga sekaligus adalah imam bagi umat Islam di Yogyakarta. Penghilangan gelar "Khalifatullah" menjadikan wacana penolakan terhadap Sabda Raja banyak diperbincangkan Harian Kompas dalam produksi teksnya.

Dalam konteks politik dan kekuasaan di Jawa, sejak masuknya pengaruh Islam di pulau Jawa setelah runtuhnya Majapahit memang belum pernah ada raja perempuan yang memimpin. Hal ini yang pada akhirnya menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan dikonstruksi media dalam bentuk wacana penolakan Sabda Raja sekaligus penolakan

terhadap raja perempuan (Ratu) di keraton Yogyakarta. Sistem sosial dan politik yang patriarkhal ini pada akhirnya membentuk sikap masyarakat Jawa pada umumnya masih belum dapat menerima pemimpin perempuan, terutama jika dikaitkan dengan pemimpin agama.

Situasi sosial dan politik ini dimanfaatkan Harian Kompas sebagai media harian nasional untuk memainkan perannya sebagai lembaga yang dapat mempengaruhi opini yang berkembang di masyarakat. Situasi masyarakat Yogyakarta disampaikan Harian Kompas lebih banyak memihak pada adik-adik Sultan HB X yang menolak pemimpin perempuan. Hegemoni Kompas terlihat dalam penggiringan opini publik dengan wacana dominan yang diproduksi.

Sebagaimana disampaikan Stuart Hall (2003) bahwa dari sebuah ketimpangan akan memunculkan pertarungan antara dua kekuatan akan melahirkan konsensus melalui praktek sosial dan politik (Hall, 2003b). Konsensus tersebut terbentuk melalui proses kompleks yang melibatkan konstruksi sosial dan legitimasi, salah satunya dengan media.

Sementara Gramsci (1971) tidak melihat media sebagai alat yang pasif, tetapi media secara total bersama media tandingan membentuk sebuah ruang sebuah perang bahasa atau perang simbol dalam rangka memperebutkan penerimaan publik atau gagasan-gagasan ideologis. Bahasa menurut Gramsci (1971 : 58-59) adalah salah satu bentuk pengorganisasian konsensus yang merupakan proses subordinasi kesadaran yang dibangun tanpa kekerasan (koersi), tapi dengan melandaskan pada budaya dan persuasi intelektual.

Wacana penolakan pemimpin perempuan ini disampaikan Harian Kompas dengan diproduksi dengan melandaskan pada budaya dan persuasi intelektual kepada pembacanya. Bahasa yang digunakan dalam laporan kejadian maupun editorial Harian Kompas mengarah pada subordinasi kesadaran yang dibangun untuk mendukung raja dan gubernur di Yogyakarta dijabat laki-laki.

## KESIMPULAN

Praktik produksi wacana penolakan pemimpin perempuan di Yogyakarta dilakukan Harian Kompas dengan mengacuhkan visi dan misi perusahaan media yang berusaha untuk selalu netral dan tidak berpihak pada satu kepentingan atau kelompok tertentu. Konteks insititusonal ini tidak terlepas dari kepentingan

ekonomi dan politik Harian Kompas untuk menjaga konsumen dan khalayak pembacanya yang ada di wilayah Yogyakarta, dan juga orang-orang Jawa-Jogja yang menyebar di seluruh Indonesia. Komodifikasi terhadap pro dan kontra pemimpin perempuan di Yogyakarta dilakukan Harian Kompas untuk mendapatkan perhatian dan dukungan pembaca.

Bahasa yang digunakan Harian Kompas dalam wacana penolakan pemimpin perempuan secara tekstual dan kontekstual tidak berpihak pada kesetaraan perempuan dan laki-laki untuk menjadi pemimpin. Dalam konteks sosial yang lebih luas, dapat dilihat Harian Kompas terjebak dalam “dilema ideologis” antara isu kesetaraan gender dengan praktik budaya patriarki yang kental dalam praktik sosial di internal perusahaan. Dengan jejak tekstual berupa penempatan posisi subjek dan praktik wacana yang menempatkan wacana penolakan pemimpin perempuan secara dominan, menunjukkan dimensi hegemoni budaya dan politik yang dilakukan Harian Kompas.

Sebagai media nasional yang memiliki pembaca loyal dari seluruh Indonesia, Harian Kompas seharusnya mampu menjaga netralitasnya dalam setiap produksi teks berita dan wacana. Dalam memproduksi wacana, Harian Kompas seharusnya dapat memberikan ruang representasi yang seimbang dalam peristiwa konflik kekuasaan. Hal ini agar Harian Kompas dapat menjaga reputasi sebagai media nasional yang memiliki integritas dan netralitas dalam pemberitaannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih untuk Universitas Telkom yang telah memberikan dukungan waktu dan dana untuk terlaksananya penelitian ini. Terimakasih banyak untuk Litbang Kompas yang telah membantu menyediakan data penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. O’G. *Kuasa Kata; Jelajah Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa. 2000.
- Asichin, M., & Rochwulaningsih, Y. (2018). Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945 - 1955. *Indonesian Historical Studies*, 2(1), 13–23.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language*. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Second Edi). Routledge.
- Fairclough, N. (2013). *Language and Power* (Second Edi). Routledge.

- Fauziyah, S., & Nasionalita, K. (2018). Counter Hegemoni Atas Otoritas Agama Pada Film (Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Film Sang Pencerah). *Informasi*.  
<https://doi.org/10.21831/informasi.v48i1.17397>
- Foucault, M. (2008). The Discourse on Language. In *Truth: Engagements Across Philosophical Traditions*.  
<https://doi.org/10.1002/9780470776407.ch20>
- Graham, L. J. (2011). The Product of Text and "Other" Statements: Discourse analysis and the critical use of Foucault. *Educational Philosophy and Theory*.  
<https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2010.00698.x>
- Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. Translated by : Quintin Howane and Geofirey Nowell. London : Laurence and Wishart. 1971.
- Gramsci, A. (2006). Hegemony, Intellectuals and the State. In *Cultural Theory and Popular Culture, a Reader*.
- Hall, S. (2003a). Encoding/decoding. In *Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79*. <https://doi.org/10.4324/9780203381182>
- Hall, S. (2003b). Representation : Cultural Representation and Signifying Practices (S. Hall (ed.)). Sage Publication.
- Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Makara Human Behavior Studies in Asia*. <https://doi.org/10.7454/mssh.v8i1.77>
- Hamad, Ibnu, (2004). Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Study Critical Discorse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik. Jakarta : Granit.
- Haryatmoko, J. (2015). Kondisi Ideologis Dan Derajat Keteramalan Analisa Wacana Kritis Norman Fairclough. *Diskursus*, 14(2), 153–192.
- Kariem, M. Q., Hartomi, D., & Eldo, A. P. (2019). Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Sukses Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta. *Journal of Government and Civil Society*, 3(September), 105–116.
- Karman. (2015). Construction Of Democratic Values By Islam-Based Fundamentalist-Groups In Online Media. *Jurnal Pekommas*, 18(3), 181–190.
- Karman, N. (2017). Kontestasi Frame Surat Kabar National dalam Liputan "Aksi Bela Islam." *Journal Pekommas*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2017.2020109>
- Laksono, F., Kasim, H., & Kurniawan, N. (2011). Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ( Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ). *Jurnal Konstitusi*, 8, 1059–1086.
- Nasionalita, K., & Nugroho, C. (2020). Media Agenda on Yogyakarta Sultanate Succession. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 4(1), 61.  
<https://doi.org/10.24198/jkj.v4i1.24071>
- Nugroho, C. (2019). Relasi Kuasa Media Dan Isu Gender Dalam Program Televisi Di Indonesia. *ProTVF*. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v2i2.20816>
- Subagyo, A. (2015). Jejak Kuasa Dalam Sabda Raja dan Dhawuh Raja; Tinjauan Analisis Wacana Kritis. *International Seminar Language Maintenance and Shift V*, 350–354.